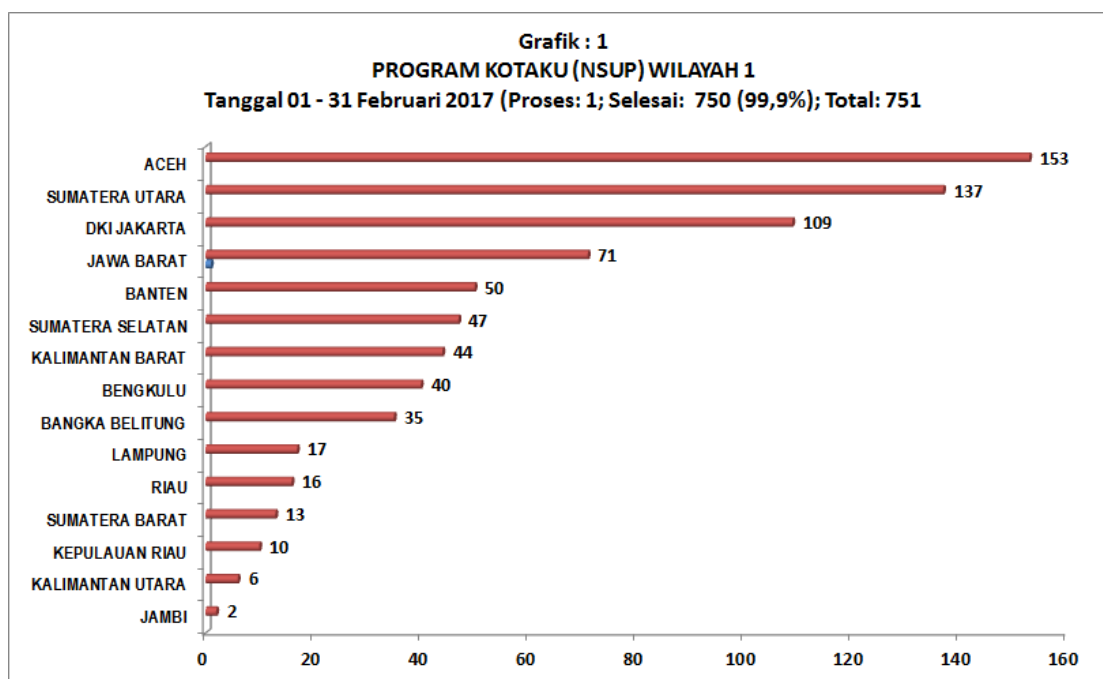


Perkembangan PPM Bulan Februari 2017

Pengelolaan Pengelolaan pengaduan pada bulan Februari 2017 telah dikelola mencapai 751 pengaduan, dengan status penanganan telah selesai 750 atau 99,9 % dan status dalam proses 1 pengaduan atau (0,1%) yang terjadi di provinsi Jawa Barat perihal komputer BKM yang rusak. Pengaduan yang tertinggi pada bulan ini terjadi di Provinsi Aceh sebanyak 153 pengaduan, sedangkan terendah di Provinsi Jambi sebanyak 2 pengaduan.

Grafik 1. Capaian Pengaduan Tiap Provinsi



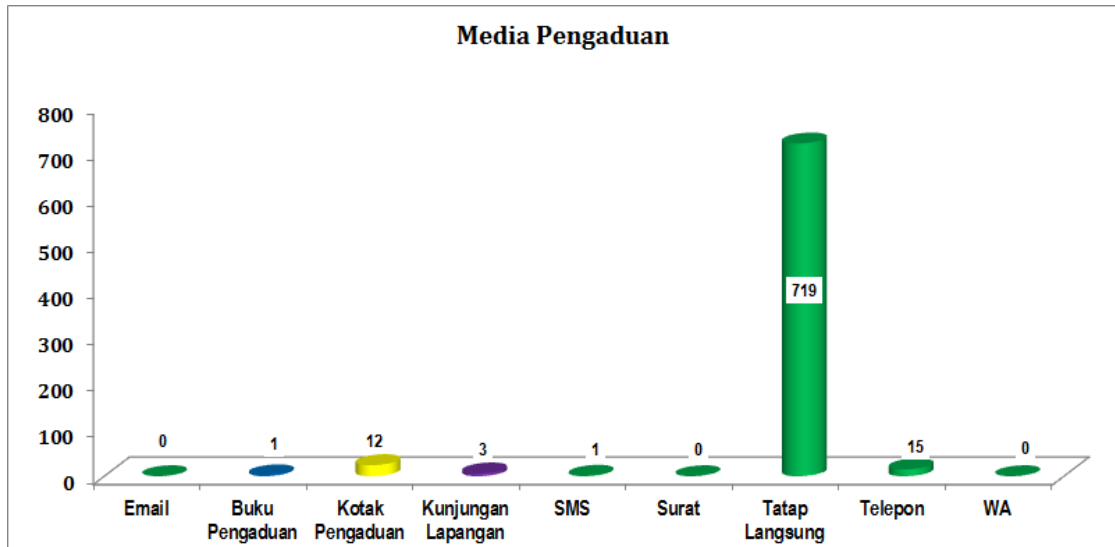
Berdasarkan lingkupnya, pengaduan administratif sebanyak 679 pengaduan (90,4%), masih dalam status proses 1 pengaduan. Pengaduan pada lingkup keuangan terdapat 72 pengaduan (9,6%) dan tidak ada status proses.

1) Pengaduan Berdasarkan Media

Berdasarkan media pengaduan yang paling dominan di bulan Februari 2017 ada pada media tatap langsung 719 pengaduan (95,7%). Media pengaduan terendah melalui facebook, Whatsaapp dan email tidak ada pengaduan (0%). Sedangkan Media kunjungan lapangan/supervisi ditemukan di Provinsi Jawa Barat dan SMS hanya 1 kasus (0,1%) ditemukan di Provinsi Sumatera Utara.

Media Kotak pengaduan terdapat di Provinsi Jawa Barat 9 pengaduan dan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Aceh serta Provinsi Riau masing-masing 1 pengaduan. Sedangkan media telepon digunakan untuk menyampaikan 9 pengaduan Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat 3 pengaduan Provinsi Riau 2 pengaduan dan Bangka Belitung 1 pengaduan.

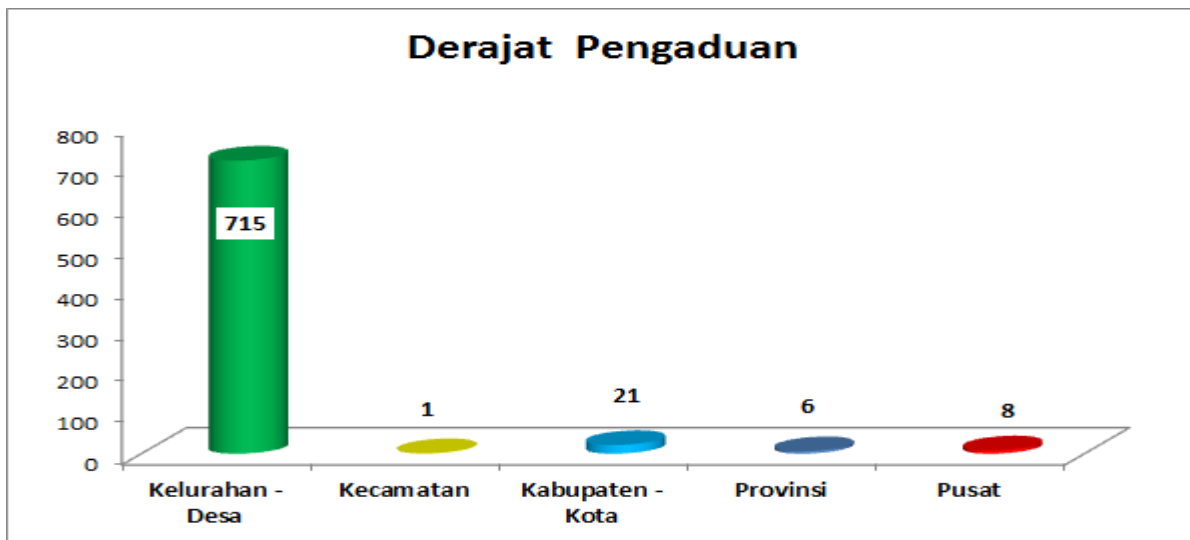
Grafik 2. Media pengaduan



2) Pengaduan Berdasarkan Derajat Aduan

Pengaduan berdasarkan derajat aduan bahwa kasus/ pengaduan lebih banyak pada derajat tingkat kelurahan/desa. Derajat kelurahan/ desa mencapai 715 kasus (95,2%) dan pengaduan yang terendah pada tingkat kecamatan 1 pengaduan (0,1%).

Grafik 3. Pengaduan Berdasarkan Derajat Aduan



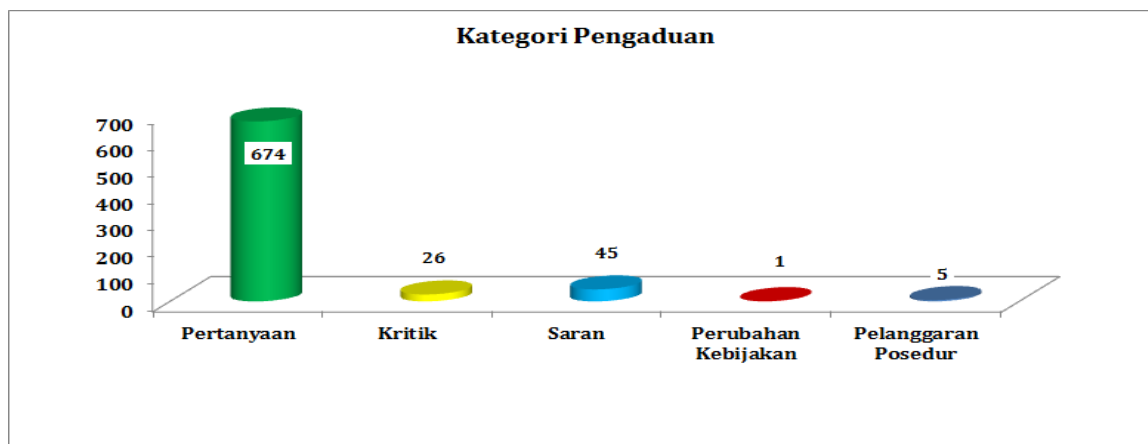
Derajat pengaduan tingkat kota/kabupaten dari 21 kasus atau 2,8%, terbanyak kasus terdapat di Provinsi Sumatera Utara 5 pengaduan, Bangka Belitung 4 pengaduan, DKI Jakarta dan Banten masing-masing 3 kasus, Lampung 2 kasus dan Jawa barat 1 kasus.

Derajat pengaduan penyelesaian pada tingkat kecamatan terdapat 1 kasus, di Provinsi Bangka Belitung. Sedangkan derajat pengaduan tingkat provinsi terdapat 9 kasus, di Provinsi Banten. Untuk derajat pengaduan tingkat pusat, terdapat 8 kasus, hanya di Provinsi Banten.

3) Pengaduan Berdasarkan Kategori

Berdasarkan kategori pengaduan, kategori tertinggi adaah pertanyaan dengan jumah mencapai 674 pengaduan atau 89,7%. Kategori saran 45 pengaduan (6,0%), kritik 26 pengaduan (3,5%), pelanggaran prosedur 5 pengaduan dan perubahan kebijakan 1 pengaduan, dan kategori lainnya tidak ada aduan.

Grafik 4. Pengaduan Berdasarkan Kategori



Pengaduan berdasarkan kategori yang tertinggi pada kategori pertanyaan 674 (89,7%). Pengaduan yang sedikit terdapat pada kategori perubahan kebijakan sebanyak 1 pengaduan (0,1%). Kasus pertanyaan terbanyak terdapat di Provinsi Aceh sebanyak 152 kasus (20,2%) dan kasus pertanyaan paling sedikit terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 1 kasus (0,1%).

Kategori saran tertinggi terdapat di Sumatera Utara 21 kasus (46,7%) dan pengaduan yang terendah terdapat di Provinsi Aceh, Riau, Kepri dan Bengkulu masing-masing 1 kasus (2,2%).

Kategori kritik terbanyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara 7 kasus (26,9%), dan kritik terendah di Provinsi Riau 1 pengaduan (3,8%) dan beberapa provinsi yang tidak ada pengaduan kritik. Sedangkan pelanggaran prosedur terdapat 5 aduan, 3 di Jawa Barat, 1 di Banten dan 1 di Sumatera Utara. Untuk pengaduan perubahan kebijakan terdapat 1 kasus di Bangka Belitung.

4) Pengaduan Berdasarkan Bidang Pelaksanaan

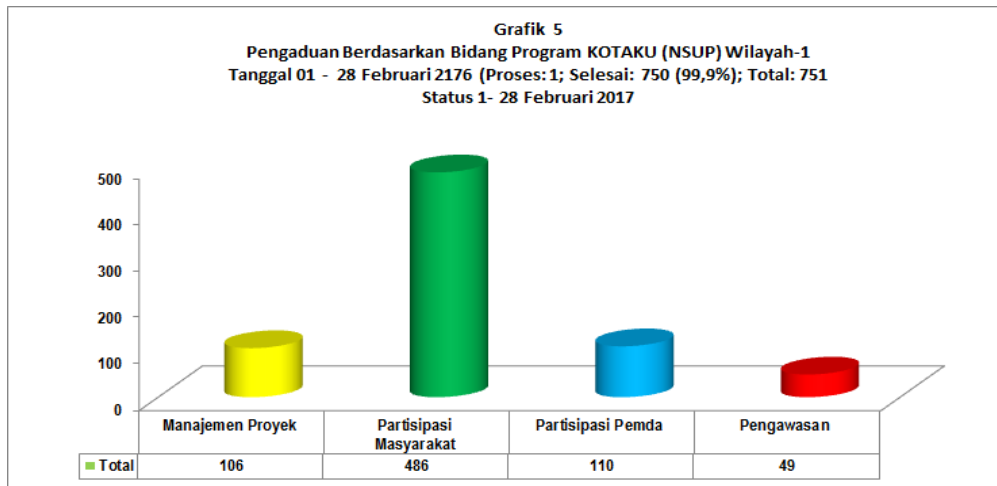
Berdasarkan bidang kegiatan partisipasi masyarakat lebih dominan mencapai 486 aduan (64,7%). Sedangkan bidang pelaksanaan kegiatan yang kasusnya terendah pada kategori pengawasan 49 kasus (6,5%).

Bidang kegiatan Manajemen Proyek paling dominan terjadi pada Provinsi Sumatera Utara sebanyak 20 kasus (18,9%) dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara, Riau dan Lampung sebanyak 1 kasus (0,9%). . Sedangkan Provinsi Jambi tidak ada pengaduan terkait manajemen proyek. Bidang kegiatan partisipasi masyarakat paling dominan terjadi pada Provinsi Aceh sebanyak 96 kasus (19,8%) dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 1 kasus (0,2%).

Sedangkan bidang kegiatan yang melibatkan partisipasi pemda paling tinggi terdapat di paling dominan terjadi pada Provinsi Aceh sebanyak 31 kasus (28,2%) dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara, Bengkulu dan Kepulauan Riau masing-masing sebanyak 1 kasus (0,9%),Sedangan Riau dan Jambi tidak ada pengaduan (0%). Pada pelaksanaan pengawasan

tertinggi terjadi di Provinsi Aceh sebanyak 11 kasus (22,4%) dan terendah di Provinsi Bengkulu, Sumatera Barat, dan Lampung masing-masing 1 kasus (2%). Sedangkan Riau, Kepulauan Riau dan Jambi tidak ada pengaduan (0%).

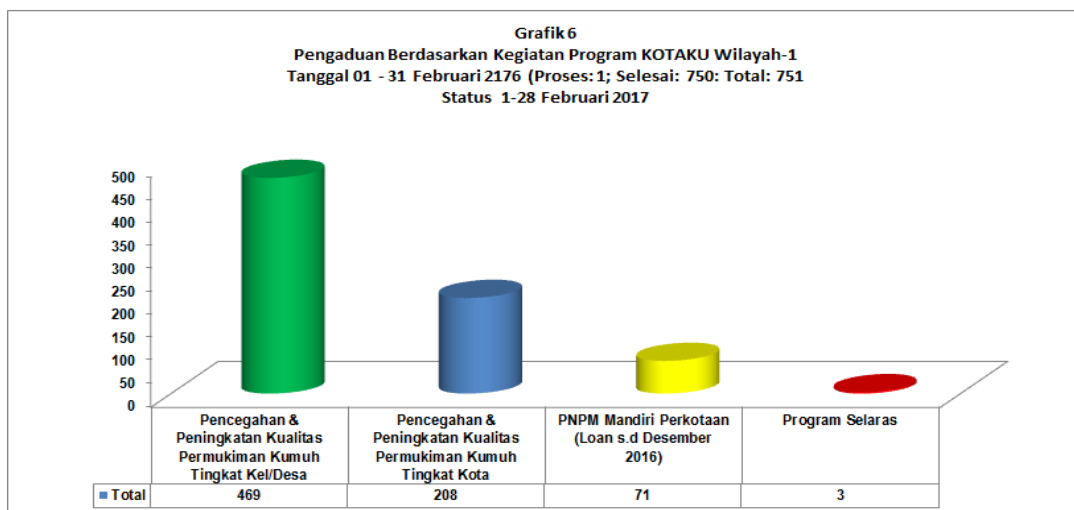
Grafik 5. Pengaduan Berdasarkan Bidang Kegiatan



5) Pengaduan berdasarkan Program kegiatan

Pada periode bulan Februari 2017, pengaduan yang berkaitan dengan program kegiatan berdasarkan skala tingkat kelurahan lebih tinggi sebanyak 469 pengaduan (62,5%). Pengaduan yang berkaitan dengan program kegiatan berdasarkan skala tingkat kota/kabupaten mencapai 208 pengaduan atau sebesar 27,7%. Sementara pengaduan yang berkaitan dengan program KOTAKU Eks. Kegiatan Program PNPM Mandiri Perkotaan 71 kasus (9,5%) dan Program Selaras Aceh sebanyak 3 pengaduan atau 0,4%

Grafik 6. Pengaduan Berdasarkan Program



Pengaduan terkait program kegiatan skala tingkat kelurahan tertinggi terdapat di Provinsi Aceh masing-masing 86 kasus (18,3%) dan yang terendah terdapat di Provinsi Jambi sebanyak 1 kasus (0,2%). Berdasarkan skala kota yang tertinggi terdapat di Provinsi Aceh 46 kasus

(22,1%) dan yang terendah terdapat di Provinsi Riau (0,5%) dan Provinsi yang tidak ada kasus (0%). Sedangkan berdasarkan Eks. Kegiatan Program PNPM Mandiri Perkotaan, pengaduan tertinggi di Provinsi Aceh sebanyak 20 kasus (28,2%) dan yang terendah terdapat di Provinsi Jambi (1,4%).

6) Isi Pengaduan Terbanyak

Pengelolaan pengaduan pada bulan Februari 2017 yang mencapai 751 pengaduan, apabila dilihat dari isi pengaduan dari segi kategori, derajat maupun sumber pengaduan, maka diperoleh 5 topik pengaduan terbanyak yaitu :

- 1) Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM, 118 kasus atau 15,7 %.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan, 99 kasus (13,2%)
- 3) Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota, Provinsi), sebesar 52 kasus atau 6,9%.
- 4) Pelaksanaan Kegiatan PPMK; P2B; RLF/Dana Bergulir, 40 kasus atau 5,3%.
- 5) Integrasi Perencanaan RPLP/RTPLP kedalam RPJM Desa sebesar 31 kasus atau 4,1%.